

**PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG (PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'IAH)**

Skripsi



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Ketatangaraan (Siyasah sar'iyyah) Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH:

MU'AWWAMATUL KHAERIA AL-JAROS

NIM: 10200116008

**JURUSAN HUKUM KETATANEGARAAN (SIYASAH SAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muawwamatul Khaeria Al-Jaros

Nim : 10200116008

Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng, 25 Juni 1998

Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Jln. Monginsidi II

Judul : Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng perspektif siyasah syari'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 06 Juli 2020

Penyusun

Muawwamatul Khaeria Al-Jaros

NIM. 10 200116008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng Perspektif siyasah syari’iyah.**”. Yang disusun oleh Muawwamatul Khaeria Al-Jaros, NIM 10200116008, mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin.

Makassar, 05 November 2020 M

19 Rabiul Awal 1442H

DEWAN PENGUJI


Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag ()

Sekretaris : Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag ()

Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag ()

Pembimbing II : Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H ()

Penguji I : Prof. Dr. Usman, M.Ag ()

Penguji II : Dr. Ashar Sinilele, S.H., M.H. ()

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag

NIP: 197311222000121002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME, Karena hanya dengan petunjuk-Nyalah sehingga Skripsi ini dapat disusun, meskipun disadari sedalam-dalamnya masih sangat bersifat sederhana, baik dari segi metode penulisannya maupun dan segi analisisnya.

Selesainya penulisan proposal ini adalah suatu perjuangan yang berat bagi penulis dalam menelusuri referensi-referensi hukum dan perundang-undangan serta mengukir kebenaran sesuai dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan, yang kesemuanya itu memerlukan pengorbanan dan kesabaran yang kuat serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis sadar sedalam-dalamnya bahwa penyelesaian proposal ini terkabul dengan adanya partisipasi dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga pada tempatnyalah bila pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph,D
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universita Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ibu Dr. Kurniati, S.Ag., M.H.I

4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. yang telah membimbing penulis dengan baik.
5. Pembimbing II Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. selaku bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh jajaran pengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun setiap ilmu yang diberikan sungguh sangat berharga.
7. Ali mahmudi, Enny Cahyani selaku orang tua penulis, terima kasih atas dukungan, pengertian, serta doa yang diberikan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Asrullah Dimas , atas waktu, dukungan, pengertian , kesabaran serta bantuan yang diberikan kepada penulis, selama pengerjaan skripsi ini, semoga kita terus bersama sampai tua dan semoga kita semua dapat sukses di kehidupan selanjutnya.
9. Aswinda, Afrah, Darma, Helda, Maya, Risda, Ismail, Albar, dan teman kelas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih selama ini telah menjadi sahabat dan saudara bagi penulis, terima kasih atas kesabarannya selama ini. Semoga kita semua sukses dan segala impian kita tercapai
10. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Makassar, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Pengertian Peranan.....	9
B. Pengertian, Jenis, dan Sifat Pasar.....	10
1. Pengertian Pasar	10
2. Jenis-Jenis Pasar	12
3. Pengelolaan Pasar.....	14
4. Ciri-Ciri Pasar	15
5. Sistem Pasar	15
6. Sifat Pasar	16
C. Sejarah dan Fungsi Pasar	17
1. Sejarah Pasar	17

2. Fungsi Pasar.....	18
D. Pasar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	19
E. Tinjauan Tentang Dinas Pengelolaan Pasar.....	22
1. Dinas Pengelolaan Pasar.....	22
2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar.....	23
3. Standarisasi kualitas Layanan Pasar.....	26
4. Efisien.....	27
F. Dasar Hukum Pengelolaan Pasar.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan	41
B. Peran Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng dalam Melaksanakan Peran.....	49
1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	50
2. Pelaksanaan Peran Program Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan demi meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Sentral Bantaeng	55
C. Hambatan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan dalam melaksanakan Perannya.....	57

BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
و	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah dan alif</i>	Ā	a dan garis di atas

	atau yā'		
ى	<i>kasrah</i> dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

لِ
الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةِ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

najjainā

: نَجَّيْنَا :

al- اَلْ

ḥaqq

: نُحَقِّقُ

: اَدُوَّوْنُ : *'aduwwun*

Jika huruf *ʿ* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

: اَلِيّ

: *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

: اَرَبِيّ

: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ا) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: اَلْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

: اَلْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

: اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

: اَلْمُرُونُ : *ta'murūna*

: اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

الله دِينٌ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هَمٌّ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata

mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-

Qur‘ān

Naṣīr al-

Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr

al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Muawwamatul Khaeria

Al-Jaros Nim : 10200116008

Judul : Dinas Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng (perspektif siyasah syar'iah)

Pokok permasalahan yang menjadi kajian utama dari penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng di tinjau dari permen perdagangan Nomor 37 Tahun 2017. Dari pokok masalah tersebut, ditarik sub masalah yaitu : 1) Bagaimana Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng ? 2) Hambatan apa sajakah dalam pelaksanaan Peran Dinas Pengelolaan pasar di Kabupaten Bantaeng ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field kualitatif research*. Sedangkan pengumpulan data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang di kumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan artikel yang relavan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) peeraturan menteri perdagangan nomor 37 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, adapun beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan pasar yaitu pasal 18, 30, 31, 32, dan 34 telah terimplementasi secara maksimal. 2) hambatan yang dialami adalah persoalan anggaran yang minim, belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas , fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan barang/jasa, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang sejahtera adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 telah menyebutkan bahwa pemerintah ditugaskan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan banyak unsur-unsur yang dapat menunjang, baik itu dari segi mental maupun dana yang diperlukan bagi pembangunan itu sendiri.

Salah satu faktor penopang ekonomi suatu bangsa adalah partisipasi atau kegiatan ekonomi dari rakyat. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun jasa.

Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk memudahkan akses dalam kehidupan sehari-hari. Pasar menjadi salah 2 satu sarana ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam peningkatan pendapatan ekonomi suatu daerah dan apabila dikhususkan ke daerah Kecamatan, pasar satu-satunya tempat dimana transaksi ekonomi berlangsung.

Pasar merupakan tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, aktivitas ekonomi pasar juga merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga yang sesuai. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem, pasar memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat.

Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah. Pasar diklafikasikan menjadi pasar.

Pasar merupakan salah satu aset penting bagi sebuah daerah, tidak berlebihan ketika pemerintah membentuk lembaga birokrasi yang khusus mengelola pasar tradisional, di Sulawesi Selatan untuk mengelola pasar-pasar yang ada.¹ Perluasan kewenangan yang dilakukan negara melalui pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya di daerah termasuk pasar tradisional sebagai pondasi ekonomi rakyat, ini tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan kewenangan Negara di daerah.²

Pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya banyak manusia dari berbagai kelompok masyarakat menjadi tempat yang menarik, karena merupakan sebuah tempat yang memungkinkan terjadinya komunikasi serta interaksi mendalam manusia di dalamnya. Tidak berlebihan kiranya pasar menjadi arena kebijakan untuk memperbaiki lingkungan pasar agar mampu menyesuaikan dengan masyarakat dalam konteks kekinian.

Sebagai pihak yang berwenang dalam masalah pengelolaan pasar tradisional, Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantaeng harus mampu memaksimalkan perannya yang telah tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan tertera pada Pasal 30 (1) Pengelolaan Sarana Perdagangan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau

¹ Cakra Ramadana, 2013, *Perlawanan Pedagang Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Makassar atas Pembongkaran Makassar Mall* (Skripsi S-1), h.11

² Lihat UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota. Dan Pasal 31 Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan: sosial ekonomi daerah, jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat dan lokasi pasar.³

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan revitalisasi pasar tradisional dimana revitalisasi merupakan sebuah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi disebabkan pasar tradisional di Kabupaten tidak terjaga kebersihan dan keamanannya sehingga masyarakat berlahan-lahan meninggalkan tempat tersebut. Skala revitalisasi ada 10 tingkatan makro dan mikro.

Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang.

³ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Keadaan ini sangat berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitar tempat tersebut. Keadaan ini membuat pasar menjadi tidak layak keberadaannya sebagai pasar, terlebih lagi ada di pusat Kabupaten Bantaeng. Tempat tersebut merupakan kawasan pusat perekonomian dan perdagangan bagi masyarakat Bantaeng. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak bagi perkembangan sosial maupun ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat. Berangsur-angsur tempat tersebut akan ditinggalkan para pengunjung atau konsumen dengan memilih tempat yang lebih nyaman, sehat, dan aman untuk berbelanja.

Berangkat dari problematika tersebut, penulis bermaksud membuat sebuah Skripsi yang berjudul Peran Dinas Pengelolaan dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng (Studi Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan)

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk mendapatkan gambaran dan lebih memudahkan pemahaman fokus dan deskripsi fokus terkait dengan masalah peran dinas pengelolaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di kabupaten Bantaeng menurut ketatanegaraan islam. Peneliti membuatnya dalam bentuk table

N0.	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Peran	Peran adalah hak dan kewajiban seseorang yang sesuai dengan kedudukannya.
2.	Dinas pengelolaan pasar	Suatu bangunan yang berada di setiap kota yang bertugas untuk membantu tugas walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.	Pendapatan masyarakat	adalah suatu aset pendapatan bagi masyarakat.
4.	Ketatanegaraan Islam	hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan-urusan umat sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasarnya yang universal (kully) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan masalahnya yakni Bagaimana Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kabupaten Bantaeng ditinjau dari Permen Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017, berangkat dari pokok masalah tersebut, maka di tarik sub masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bantaeng ?
2. Hambatan apa sajakah dalam Pelaksanaan Peran Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bantaeng

D. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Prof. Dr. Damsar, Dr. Indrayani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Pasar. Dalam buku ini menjelaskan mengenai Perspektif baru Sosiologi terhadap fenomena dan dinamika pasar.
2. Di tulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam. Dalam buku ini menjelaskan mengenai mekanisme kerja pasar pada masa Rasulullah , pandangan Sarjana Muslim, dan menurut Ekonomi Islam.
3. Yulia Nurliani Lukito dalam bukunya yang berjudul Revitalisasi Ruang Pasar Tradisional melalui pendekatan desain dan interaksi pengguna Ruang. Dalam buku ini menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat merevitalisasi pasar tradisional sebagai tempat jual beli dan ruang publik.

E. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu :

- a. Untuk Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten bantaeng.
- b. Untuk mengetahui langkah taktis oleh Dinas Pengelolaan Pasar untuk meretas hambatan dalam melaksanakan perannya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Agar mampu menambah pemahaman bagi peneliti maupun pembaca terhadap peran dinas pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Agar dapat menjadi bahan pengetahuan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Peranan

Peranan merupakan seperangkat harapan yang didalamnya ditemui seperangkat peran (role set) yang dimiliki oleh seseorang pada suatu posisi tertentu. Dalam suatu status tidak hanya memiliki satu peran saja namun juga terdapat sejumlah peran lain yang saling berkaitan.⁴

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata peranan. Menurut Soejono Soekanto Peranan adalah *pertama*, merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan peranan. *Kedua*, peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang dan peranan itu menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. *Ketiga*, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Menurut Miftah Thoha peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah di kenal.⁵

⁴Agung S.S Raharjo, *kantong sosiologi sma ips*, (Yogyakarta: penerbit pustaka widyatama,2009), h.36

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep atau prihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.

Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.⁶

B. Pengertian, Jenis, dan Sifat Pasar

1. Pengertian Pasar

Dalam bahasa latin, pasar dapat di telusuri melalui akar dari kata “mercatus”, yang bermakna berdagang atau tempat berdagang . pasar memang merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu ekonom, namun sekarang pasar telah menjadi kajian interdisiplin. Pasar tidak hanya dikaji oleh ilmu ekonomi tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu komunikasi, antropologi, psikologi ,dan ilmu politik. Dengan pandangan seperti ini, maka di antara berbagai sudut pandang ilmu terdapat bagian yang tumpang tindih satu sama lain dalam melihat pasar. Itu berarti ada bagian yang sama-sama diperhatikan, baik sosiologi maupun ilmu sosial lainnya ketika mengkaji fenomena pasar.

Terdapat tiga makna yang berbeda di dalam pengertian tersebut: *satu*, pasar dalam artian secara fisik; *dua* dimaksudkan sebagai tempat mengumpulkan; dan

⁶ Suejono soekanto, *sosiologi sebagai suatu pengantar*, (Jakarta : Rajawali pers, 2005) h.244

tiga, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *market place*. Pada abad ke-16, pengertian pasar, menurut Swedberg seperti yang di kutip Zusmelia, menemukan arti baru, yaitu “membeli dan menjual secara mum” dan “penjualan (interaksi pertukaran) yang di kontrol oleh *demand* dan *supply*”. Kelihatannya definisi yang disebut terakhir inilah yang dirujuk oleh ilmu ekonomi sampai sekarang ini.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan antara pasar sebagai tempat pasar (*market place*) dan pasar (*market*). Pasar sebagai tempat pasar (*market place*) merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia membeli barang dan jasa tersebut. Sedangkan pasar (*market*)

dilihat oleh sosiolog sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa pasar. Pasar oleh sebab itu, dapat dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga.

2. Jenis-jenis Pasar⁷

Menurut Lialananda (1997), pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yakni menurut jenis kegiatannya, menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, menurut waktu kegiatannya, dan menurut status kepemilikannya.

- a. Menurut jenis kegiatannya, pasar di golongkan menjadi tiga jenis:
 - 1) Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
 - 2) Pasar grosir yaitu dimana permintaan dari penawaran dalam jumlah besar.
 - 3) Pasar induk , pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.
- b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis :
 - 1) Pasar nasional, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁷ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, (Bandung : Sinar Baru,2002), h.25

- 2) Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000-220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk, dan pasar grosir.
 - 3) Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran, pasar khusus, dan pasar induk.
 - 4) Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar ecer.
 - 5) Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.
- c. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:
- 1) Pasar siang hari, yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00
 - 2) Pasar malam hari, yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00
 - 3) Pasar siang malam, yang beroperasi 24 jam *nonstop*.

- 4) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah.

d. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

- 1) Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diakui.
- 3) Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintah daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar yang tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW. Pasar liar ini dibagi tiga berdasarkan penanggungjawabannya, yakni pasar perorangan, pasar RW dan pasar desa.

3. Pengelolaan Pasar

Dari beberapa tujuan dalam pengelolaan pasar tradisional (Permendagri No.

20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional), yaitu:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pasar tradisional agar konsumen dapat bertahan untuk berbelanja dipasar tradisional, yaitu:

- 1.) Pengelolaan pasar harus lebih profesional.

- 2.) Harus mampu mengubah pola pikir pedagang.
- 3.) Mampu memenuhi keinginan konsumen dengan baik.
- 4.) Sarana dan prasarana yang nyaman seperti parkir, gang, penerangan, sirkulasi udara, keamanan dan kebersihan.
- 5.) Citra pasar tradisional harus diperbaiki.
- 6.) Secara fisik pasar tradisional harus mampu menarik konsumen untuk berbelanja.
- 7.) kemampuan untuk memuaskan semua pihak yang terkait dengan pasar tradisional.

4. Ciri-ciri Pasar

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri – ciri pasar, antara lain :

- a. Terdapat calon pembeli dan penjual.
- b. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan.
- c. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak.
- d. Terdapat interaksi diantara pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

5. Sistem Pasar

Sistem proses perpindahan barang distribusi pada pasar secara umum, ada tiga jalan yaitu :

a. Secara langsung

Perpindahan barang dari produsen langsung ke konsumen. Nilai barangnya sebagian besar mempunyai sifat :

- 1) Barang yang segar / fresh (lekas basi)
- 2) Kebutuhan sehari hari berdimensi kecil

b. Secara semi langsung (dengan perantara)

Perpindahan barang dari produsen ke konsumen dimana ada pihak ke tiga dalam ikut mendukung (perantara). Disini tumbuh pedagang sebagai perantara.

c. Secara tidak langsung

Bentuk penyampaian barang dari produsen melalui pihak ke tiga terlebih dahulu sebelum ke konsumen. Pihak pedagang besar dan eceran, sebagai proses penyampaian barang sampai ke konsumen akhir.

6. Sifat Pasar

Pasar Umum Adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pasar ditinjau dari klasifikasinya dibedakan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas Satu

Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional.

b. Pasar Kelas Dua

Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota, Misalnya Pasar Beringharjo

c. Pasar Kelas Tiga

Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota.

d. Pasar Kelas Empat

Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang terutama di dalam bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan.

e. Pasar Kelas Lima

Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang dan melayani tingkat perdagangan blok.

C. Sejarah dan Fungsi Pasar

1. Sejarah pasar

Kegiatan perdagangan saham sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu ketika nama Indonesia masih Hindia Belanda. Kegiatan perdagangan efek di Batavia (sekarang jakarta) dimulai pada tanggal 14 Desember 1912, di Surabaya

pada tanggal 11 Januari 1925, dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Kegiatan ini kutip Perang Dunia II berlangsung (1940). Pada waktu itu perdagangan efek tidak terorganisasi dengan baik sehingga sulit untuk mendapatkan data historis tentang kemajuan perdagangan. Para pelaku perdagangan efek pada waktu itu kebanyakan adalah orang Belanda, Arab, dan Cina. Sementara itu hubungan antara *Amsterdamse effektenbewn* (Belanda) dan perdagangan di Batavia (Jakarta) sudah berlangsung sejak tahun 1880, tetapi tidak terorganisasi dengan baik. Saham perkebunan “goal para” Batavia sudah diperdagangkan sejak tahun 1892. Harian ‘*het Centrum*’ yang terbit di Yogyakarta menjual sahamnya pada tahun 1896. Banyak jenis saham yang tercatat di Bursa Amsterdam tetapi perdagangannya dilakukan di Batavia.⁸

Pada umumnya pasar mengambil tempat di suatu ruang atau lapangan terbuka, dibawah pohon besar yang telah ada, di salah satu sudut perempatan jalan atau tempat-tempat lain yang strategis dilihat dari jarak capai dan aksesibilitas dari dalam dan dari luar lingkungan yang bersangkutan.

Pasar dimulai dari semacam “happening” pada waktu-waktu tertentu saja, dengan prasarana serba sementara. Sifatnya yang hadir pada waktu-waktu tertentu inilah kemudian dikenal adanya Pasar Minggu, Pasar Senin, Pasar Rabu, Pasar Jumat, Pasar Kliwon, Pasar Legi, Pasar Pon, dan sebagainya. Pada dasarnya, kegiatan pasar sebagai tempat jual beli barang dan jasa di antara para petani yang membawa hasil bumi, produsen/pedagang eceran barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan penduduk lingkungan setempat. Kegiatan pertukaran barang dan jasa, dengan tutur sapa yang akrab, tawar menawar barang, pemilihan tempat dan

⁸ Mohamad Samsul, pasar modal dan manajemen portofolio, (Surabaya: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), h.25-26

suasana akrab menjadi tradisi tersendiri, sehingga pasar seperti ini bisa disebut pasar tradisional pusat perbelanjaan. Di kota-kota Indonesia, selanjutnya dikenal pusat perbelanjaan peninggalan zaman Belanda, dengan empat bentuk, yaitu: - Pasar (area terbuka, bangsal dan los beratap atau kombinasi keduanya) dengan toko dan warung di sekitarnya (retail).

2. Fungsi Pasar

Pasar yang berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk pelayanan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi atau bidang diantaranya:

a. Segi Ekonomi

Merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mawadahi kebutuhan sebagai *demand* dan *suplai*.

b. Segi Sosial Budaya

Merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal.

c. Segi Arsitektur

Menunjukkan ciri khas daerah, yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.⁹

Dari ketiga segi atau bidang yang disebutkan diatas, dapat diambil atau diartikan fungsi dari pasar adalah suatu wadah aktivitas dari tradisi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dilakukan secara barter maupun jual-beli yang

⁹M.Darwis, *Penataan Kembali Pasar Kotagede*. Skripsi S-1.Fak. Teknik.Jur.Arsitektur, Universitas Gajah Mada. 1984

diwujudkan dalam suatu bangunan. Selain itu fungsi pasar adalah: Selain itu fungsi pasar adalah :

- 1) Pasar sebagai tempat keluar masuk orang tanpa larangan dan tanpa membedakan status.
- 2) Pasar memberikan pelajaran bagi pedagang cara melayani konsumen dengan baik.
- 3) Pasar sebagai fasilitas yang tumbuh secara organis.

D. Pasar dalam Perspektif Hukum Islam

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli¹⁰. Menurut istilah pasar berarti tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya seorang manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan ini merupakan sunnatullah dan fitrah manusia dimuka bumi. Keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar menukar antara yang membutuhkan (demand) dan yang memberikan (supply) untuk barang dan jasa yang mereka butuhkan. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut melahirkan suatu system yang disebut pasar. Pasar adalah falsafah perekonomian. Ekonomi tidak bisa terpisah dari konsep pasar. Ada tiga jenis rumah tangga ekonomi dalam pasar yakni, RTP (rumah tangga produsen), RTK (rumah tangga konsumen), dan RTN (rumah tangga Negara) yang diperankan

¹⁰ Ebta Setiawan, KBBI Online, (*badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud*, 2014), Versi 1,3.

oleh pemerintah.¹¹ Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan penjual meliputi yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Misalnya pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum orang atau industry akan berperan ganda, yakni sebagai pembeli dan penjual.¹² Sistem yang dipergunakan oleh suatu pasar bergantung pada system perekonomian yang dianut. System kapitalis lebih cenderung pada pada system pasar liberal (bebas). System ini membiarkan pasar berjalan dengan sendirinya sesuai dengan hukum pasar tanpa melibatkan campur tangan pihak pihak tertentu, termasuk pemerintah. Mereka percaya, pasar dapat menjawab tiga permasalahan perekonomian (apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi) dengan baik. Adapun system komando menepatkan pemerintah sebagai pihak yang mendominasi segala aspek pasar, termasuk penetapan harga. Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun pratikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selalu selarasnya antara prioritas individu dengan social atau antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidak sempurnaan persaingan, dan lain lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang

¹¹ H. Soeharsono Sagir, *kapita selekta ekonomi Indonesia edisi 1*, (Jakarta: kencana¹¹) cet pertama, hal 19

¹² Adiwarmarman Karim, *ekonomi mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) cet ke 3 hal 6

halal dan baik hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³ Ajaran Islam berusaha menciptakan suatu keadaan pasar yang berdasarkan nilai nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah perfect competition market plus, yaitu plus nilai nilai syariah Islam. Implementasi nilai nilai syariah yang sebahagiannya merupakan concern masyarakat diluar Islam sekalipun. Bukan hanya menjadi kewajiban individu para pelaku pasar tetapi juga butuh intervensi pemerintah.¹⁴ Pasar dalam ekonomi Islam menganut system pasar bebas terkendali. Maksudnya pemerintah boleh turun tangan jika keadaan memerlukan demi kepentingan masyarakat dan menjaga pasar agar berjalan dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang tidak memandang kepentingan individu diatas kepentingan bersama.¹⁵

¹³ Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*.

¹⁴ Mawardi M.Si, *ekonomi Islam*, (pekanbaru: alaf riau graham UNRI PRESS, 2007) cet pertama, hal 99

¹⁵ Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan investasi syariah*, (Jakarta: PT serambi ilmu semesta, 2009) cet pertama, hal-87

E. Tinjauan Tentang Dinas pengelolaan pasar

1. Dinas Pengelolaan Pasar

Peran Dinas Pengelolaan Pasar yaitu pelaksanaan fungsi dan tugas suatu lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bantaeng, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar yang harus dicapai dengan melaksanakan fungsi-fungsi :

- a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas
- b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- c. pengelolaan pendapatan pasar
- d. pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima
- e. peraturan los dan kios pasar
- f. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima
- g. penyelenggaraan sosialisasi
- h. pembinaan jabatan fungsi

Sedangkan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2010 Bab V tentang Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bantaeng berkewajiban melakukan pengelolaan dan perlindungan pasar.¹⁶

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar

¹⁶ B' tara Linggamursi Nisditya Pramana, Is Hadri Utomo, *Peran Dinas Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Pasar Kliwondalam Proses Revitalisasi Pasar Kliwon Surakarta, 1, Vol 1 Tahun 2017, h. 28*

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri.

Perencanaan berarti memperhitungkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Perencanaan dan pengelolaan pasar berarti untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Oleh karena itu kecenderungan pertumbuhan penduduk, persediaan lahan perluasan, pertumbuhan fasilitas dan kemajuan teknologi dengan penerapannya harus dimasukkan didalam perencanaan tersebut. Selain itu sumber daya pengelolaan pasar juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pasar tersebut sebab dalam mengelola atau manajemen pasar memerlukan keahlian dan pengalaman.

Pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Tujuan perencanaan dan pengembangan pasar yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang bisa tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan dalam perencanaan dan pengelolaan pasar. Peran pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pasar sangat menentukan berkembang atau tidaknya suatu pasar tradisional contohnya dapat kita lihat dalam penyediaan infrastruktur dan memperluas jaringan kerja aparatur pihak pemerintah dengan pihak swasta.

Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap

pelanggan/masyarakat. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar di antaranya : ¹⁷

- a. Otonomi pengelolaan Pasar Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk dapat mengatur semua urusan yang menjadi kewajiban pemerintah itu sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.
- b. Sistem pengelolaan yang terintegrasi Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan sebuah pasar yang baik. Pasar haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi dalam satu sistem. Keterpaduan sistem manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen yang profesional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola pasar harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan. Dari segi pengelolaan parkir itu sendiri sumber daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan, Pengelolaan kebersihan dalam rangka perwujudan

¹⁷ [www.scribd.com/doc/115097125/Pedoman-Umum-Manajemen-Pengelolaan Pasar](http://www.scribd.com/doc/115097125/Pedoman-Umum-Manajemen-Pengelolaan-Pasar) di akses pada 10 Oktober 2019.

pasar yang bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembiayaan operasional kebersihan. Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme manajemen pasar.

- c. Memaksimalkan pendapatan pasar kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran penghasilan yang diperoleh oleh organisasi untuk membiayai kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan pasar. Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai operasional pasar. Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

3. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang yang bejualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat berdagang, diantaranya : ¹⁸

- a. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar terssbut.
- b. Pasar yang bersih dan aman.
- c. Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak.
- d. Minimnya penarikan retribusi.

¹⁸ http://www.academia.edu/8915601/TATA_KELOLA di akses pada 10 Oktober 2019.

e. Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan.

Adapun ekspektasi pengunjung pasar diantaranya:

- 1) Pasar yang nyaman, aman, dan bersih.
- 2) Kelengkapan barang dagangan.
- 3) Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. Pengelola pasar juga harus terus-menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan tersebut secara terus menerus.

4. Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal. Sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara output yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelolaan pasar harus bisa menentukan pilhan-pilihan tersebut dengan prinsip efisien.

Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan

dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternatif tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi.

5. Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional

Ada beberapa tujuan dalam pengelolaan pasar tradisional (Permendagri No. 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional), yaitu:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pasar tradisional agar konsumen dapat bertahan untuk berbelanja di pasar tradisional, yaitu:

- 1) Pengelolaan pasar harus lebih profesional.
- 2) Harus mampu mengubah pola pikir pedagang.
- 3) Mampu memenuhi keinginan konsumen dengan baik.
- 4) Sarana dan prasarana yang nyaman seperti parkir, gang, penerangan, sirkulasi udara, keamanan dan kebersihan.
- 5) Citra pasar tradisional harus diperbaiki.
- 6) Secara fisik pasar tradisional harus mampu menarik konsumen untuk berbelanja.
- 7) kemampuan untuk memuaskan semua pihak yang terkait dengan pasar tradisional.

6. Konsep Pengelolaan Pasar

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *Management*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko.¹⁹ Menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.²⁰

F. Dasar Hukum Pengelolaan Pasar

Dalam pengelolaan pasar oleh Dinas terkait dalam suatu daerah Kabupaten Kota maka dalam pelaksanaannya harus merujuk pada suatu peraturan tertentu, dikarenakan negara kita adalah negara hukum pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka dari itu yang menjadi rujukan dalam pengelolaan pasar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

¹⁹ Handoko, T.Hani, *manajemen*, (Yogyakarta: BPHE Yogyakarta, 2011), h.8

²⁰ Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/pasar> pada tanggal

37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan, adapun beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan pasar yaitu :²¹

1. Pasal 18

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

2. Pasal 19

(1) Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat harus:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada SNI Pasar Rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat dengan gambar tampak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

3. Pasal 30

- a. Pengelolaan sarana Perdagangan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu.

²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan

- b. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

4. Pasal 31

Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan:

- a. Sosial ekonomi daerah;
- b. Jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
- c. lokasi pasar.

5. Pasal 32

- a. Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - 2) peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - 3) pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - 4) pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - 5) penerapan perlindungan konsumen; dan
- c. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan. Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk

pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

6. Pasal 33

- a. Pemeliharaan Sarana Perdagangan yang telah dihibahkan menjadi tugas dan tanggung jawab gubernur atau bupati/walikota.
- b. Dalam hal sarana Perdagangan belum dihibahkan, gubernur atau bupati/wali kota tidak dapat memungut retribusi pemanfaatan bangunan Sarana Perdagangan.

7. Pasal 34

- a. Gubernur atau bupati/wali kota dalam melakukan pemanfaatan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Pusat Distribusi sesuai dengan peruntukannya dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.
- b. Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.
- c. Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, bupati/wali kota memberikan prioritas tempat usaha di dalam.

8. pasal 35

- a. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang pembiayaannya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Direktur Jenderal Perdagangan dalam negeri.

- b. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

9. Pasal 36

Gubernur atau bupati/wali kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administrasi tidak mendapatkan alokasi bantuan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan pada tahun berikutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif lapangan Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.

Berdasarkan pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian ini di maksudkan untuk menggali suatu fakta dengan hasil wawancara, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realitia yang ditemukan di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati bagaimana peran dinas pengelolaan pasar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bagaimana langkah taktis oleh dinas pengelolaan pasar untuk meretas hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan judul penelitian, maka Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng khususnya Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng, Kantor Dinas Koperasi , UMKM dan Perdagangan. Lokasi tersebut menjadi pilihan Penulis sebab terdapat beberapa

data dan pendapat narasumber yang bisa dijadikan bahan kajian serta penelitian dengan tinjauan Yuridis Empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dan kasus cara pendekatan ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat-pendapat para ahli. Wawancara bersama beberapa informan untuk memperoleh informasi dari narasumber/ seseorang terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan langsung kepada Kepala Dinas Koperasi Ukm dan perdagangan dan Pelaku Usaha Pasar Sentral di Kabupaten Bantaeng.

2. Data Skunder

Data sekunder berupa semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan sebelumnya, baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada dalam situs-situs internet dan data lain yang terjadi di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng dengan menelisik peran serta tanggungjawab Dinas Koperasi Ukm dan perdagangan Kabupaten Bantaeng terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan yang cermat di Pasar Sentral Bantaeng. Observasi dilakukan secara langsung karena Penulis ingin memperoleh data secara akurat di lapangan.

2. Wawancara

Penulis melakukan metode *Sampling Purposive* yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan ciri khas populasi pedagang yang ada di Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng. Dengan Demikian pemilihan sampel hanya 5 jenis pedagang dilokasi penelitian.

wawancara terhadap informan secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui pendapat, keyakinan, perasaan. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber yang selaku Kepala Dinas dan jajarannya dan beberapa Pihak Terkait Khususnya Pelaku Usaha. Wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan.

Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian penting untuk menyediakan alat-alat yang mendukung penelitian tersebut. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam proses pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu :

1. Diri Sendiri

Instrumen utama dalam proses penelitian adalah diri sendiri yang berperan penting dalam melakukan penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara yaitu berisi daftar pertanyaan yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan pertanyaan mengenai masalah yang akan diteliti kepada narasumber atau informan.

3. Alat Tulis

Alat tulis yang dimaksudkan adalah buku dan pena yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara.

4. Alat Perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam proses wawancara saat wawancara berlangsung. Sekarang ini, teknologi telah memudahkan dalam melakukan proses perekaman, yaitu bisa menggunakan Handphone atau telepon genggam.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode ini ;

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sesuai metode *Sampling Purposive* merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti dalam wawancara dengan mengurai ciri khas dalam suatu objek populasi.

2. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan verifikasi.

3. Penyajian Data

Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Bantaeng (Studi Analaisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan) guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan dan penelitian. Penelitian di tuntut agar mencapai hasil penelitian yang objektif. Maksudnya, yaitu bahwa jika suatu penelitian telah memenuhi standar keobjektivitasnya, maka penelitian tersebut dianggap telah diuji dan di akui keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validasi hasil penelitian, juga di tuntut dalam meningkatkan ketekunan jika melakukan penelitian.

Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dari di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng adalah Instansi yang menaungi Pasar Sentral Bantaeng yang notabene menjadi garda terdepan dalam penentuan kebijakan dalam hal konsensus perdagangan secara internal kabupaten serta mengatur seluruh komponen untuk menunjang pendapatan daerah khususnya pendapatan pedagang Bantaeng.

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan perlu mendapat prioritas untuk berperan aktif dalam kanca perekonomian di Kabupaten Bantaeng khususnya, yang pada akhirnya mampu memberikan Kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Daerah dengan kekuatan ekonomi rakyat yang merupakan pelaku ekonomi terbesar dimasyarakat, mengharapkan struktur Perekonomian akan solid, kokoh dan kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi baik persoalan yang tumbuh didalam negeri maupun akibat pengaruh dari perekonomian global.

Berbagai permasalahan, tantangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya akan terus ditekan hingga mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sehingga institusi pemerintah dalam hal ini kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, melakukan langkah-langkah strategis, arah kebijakan yang tiada hentinya guna menyelesaikan masalah-masalah ekonomi tersebut.

Dengan demikian pelayanan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.



VISI

“Terwujudnya Masyarakat Bantaeng Yang Sejahtera Lahir Batin Berorientasi Pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian Dan Keunggulan Berbasis Agama Dan Budaya Lokal”

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa Bantaeng pada tahun 2018-2023 menjadi **Masyarakat Sejahtera** yang dimaknai bahwa berbagai kebijakan strategis dari penjabaran visi tersebut mengarah pada terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM dan Ekonomi masyarakat dengan menjunjung Tinggi Keadilan dan kelestarian sehingga Kabupaten Bantaeng tampil sebagai **Masyarakat sejahtera dan Unggul**, harapan tersebut tentunya merupakan bagian dalam rangka kemajuan peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat dan

kesehatan yang dibingkai dalam Keadilan dan Kelestarian . Seiring dengan hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari aspek nilai budaya lokal masyarakat Bantaeng dalam bingkai keagamaan.

MISI

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama priode 2018-2023 akan direncanakan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
2. Meningkatkan Akselerasi Program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan..
5. Mengoptimalkan Pengembangan Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Secara Umum Dinas ini memiliki 3 komponen yang mengurus hal berbeda , yaitu :

1. Bidang Koperasi Perkembangan koperasi di Kabupaten Bantaeng setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dilihat dari jumlah koperasi, anggota, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha.
2. Bidang UKMK menaungi segala jenis Usaha yang ada di Bantaeng semisal usaha dibidang Pertanian,Pertmbangan, Penggalian ,Industri

Pengolahan, Pengadaan Air, Penyediaan Akomodasi Makan Minum, Informasi Dan Komunikasi Jasa Kesehatan.

3. Bidang Perdagangan Penyediaan sarana perdagangan baik berupa Pembangunan dan Revitalisasi pasar rakyat maupun pasar lelang melalui pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis maka dari itu akan dikonkritkan dalam bidang perdagangan saja yang menaungi Pasar Sentral Bantaeng sebagai fokus dari Skripsi ini dengan mengurai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana perdagangan baik berupa Pembangunan dan Revitalisasi pasar rakyat maupun pasar lelang melalui pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang
- b. Pengawasan dan legalitas usaha perdagangan melalui rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang/Ruang (TDG/R)
- c. Perlindungan konsumen dengan melaksanakan pengawasan alat ukur, takar timbang Perdagangan melalui meterologi legal dalam rangka menjamin ketepatan takaran barang yang diperdagangkan.

**DATA PASAR
TAHUN 2018**

NO	NAMA PASAR	LOKASI PASAR			INSTANSI PENGELOLA PASAR	TAHUN BERDIRI	PEMBANGUNAN/ REVITALISASI TERAKHIR	SUMBER DANA
		JALAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pasar Sentral Bantaeng	Jl. Hasanuddin	Bonto Sunggu	Bissappu	Pemda	2000	2009	APBD Kabupaten
2	Pasar Tradisional Modern Lambocca	Jl. Poros Bantaeng - Bulukumba	Biangkeke	Pa'jukukang	Pemda	1988	2011	APBN Kemendag
3	Pasar Layoa	Layoa	Layoa	Pa'jukukang	Pemda	2008	2016	DAK Kemendag
4	Pasar Banyorang	Bonto-Bontoa	Bonto – Bontoa	Tompobulu	Pemda	2003	2015	DAK Kemendag
5	Pasar Dapoko	Pullaweng	Ulugalung	Eremerasa	Pemdes	1995	2010	DAK Kemendag
6	Pasar Loka	Uluere	Bonto Marannu	Uluere	Pemda	1982	2015	APBN Kemendag
7	Pasar Bungloe	Dusun Bungloe	Bonto Tallasa	Uluere	Pemda	2008	2016	DAK Kemendag
8	Pasar Sinoa	Bonto Maccini	Bonto Maccini	Sinoa	Kopwan Puspa Mandiri	2013	2015	TP Kemendes
							2017	TP. Kementerian Koperasi dan UKM
9	Pasar Campagalo	Campagalo	Bonto Jaya	Bissappu	Pemda	1982	2016	DAK Kemendag
10	Pasar Baroe	Baroe	Kampala	Eremerasa	KUD Sunggumalai	1984	2013	Bansos Kementerian Koperasi dan UKM
11	Pasar Jannaya	Jannayya	Baroe	Eremerasa	Pemdes	1983	-	
12	Pasar Panjang	Dusun Panjang Utara	Labbo	Tompobulu	Koppas Sinar Panjang	2009		TP. Kementerian Koperasi dan UKM
13	Pasar Paranga	Paranga	Pa'bentengan	Eremerasa	Pemdes	1985		
14	Pasar Marina	Jl. Poros Bantaeng - Bulukumba	Baruga	Pa'jukukang	Pemda	2010	2011	APBN Kemendag
15	Pasar Pa'lingang	Pa'lingang	Borong Loe	Pa'jukukang	Pemdes	1989		
16	Pasar Simoko	Simoko	Campaga	Tompobulu	Pemda	2017		
17	Pasar Lonrong	Bonto Lonrong	Lonrong	Eremerasa	Pemda	2017		
18	Pasar Panaikang	Panaikang		Bissappu	Pemda	2018		APBN Kemendag

1. Uraian Tugas Kepala Dinas

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
 - 1) Membantu Bupati dalam bidang Perkoperasian, UMKM dan Perdagangan
 - 2) Memimpin, Membina dan Melaksanakan Koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan pembinaan Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - 3) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas.
 - 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan
- b. Uraian Tugas Kepala Dinas yang dimaksud pada (ayat 1) :
 - 1) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program kegiatan.
 - 2) Membina pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, pendataan dan perlengkapan dinas.
 - 3) Memberikan bimbingan, petunjuk dan tugas kepada staf.
 - 4) Mengarahkan staf dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas merumuskan kebijakan Pemerintah.
 - 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan laporan dari sekretaris dan bidang – bidang untuk mengetahui kesesuaian antara rencana kerja dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait dunia usaha dan masyarakat yang berhubungan dengan usaha lainnya.
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Uraian Tugas Kepala Bidang Perdagangan

Dalam melaksanakan kegiatannya tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan yaitu

- a. Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran teknis dalam perlindungan konsumen dan kemetrolagian, perizinan dan pengendalian perdagangan serta pengembangan sarana perdagangan
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan produk ekspor
- c. melaksanakan perumusan kebijakan pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting dalam daerah
- d. melaksanakan perumusan kebijakan penerbitan perizinan perdagangan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian
- b. Seksi Perizinan dan Pengendalian Perdagangan
- c. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Promosi

Fungsi dan Uraian Tugas.

- a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian.
- b. Tupoksi melakukan Penyiapan Rencana dan Program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Perlindungan Konsumen dan Kemeterologian

Fungsi dan Uraian Tugas :

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- b. Melaksanakan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
- c. Melaksanakan Pengawasan barang/jasa yang beredar diwilayah kabupaten
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan Penyiapan bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Perizinan dan Pengendalian Perdagangan

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- b. Melaksanakan Penerbitan Izin pengelolaan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
- c. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penimpanan barang
- d. Melaksanakan Penerbitan Surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari walaba dalam negeri dan Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
- e. melaksanakan penerbitan surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat

- f. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan perdagangan kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau
- h. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kabupaten kota
- i. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten
- j. Melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
- k. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan dan Promosi

- a. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyiapan kebijakan pengembangan sarana perdagangan
- b. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya

- d. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten
- e. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kotaa

Peran Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan demi meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Sentral Bantaeng

Dalam rangka pelaksanaan urusan Perdagangan pada tahun 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng melaksanakan 2 (Program) Program dan 4 (empat) Kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat terpenuhi dengan baik serta pemantauan terhadap ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu serta pemantauan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang diberedar dipasaran.

b. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan aktifitas jual beli sehari-hari.

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilaksanakan dalam rangka memberikan legalitas usaha perdagangan, peningkatan sarana prasarana dan sistem informasi serta perluasan akses pemasaran produk/komoditi unggulan daerah sehingga dapat menciptakan harga yang layak bagi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan bagi pengelola pasar dan pembinaan bagi pedagang pasar untuk meningkatkan SDM Pengelola dan pedagang pasar dan pemberian honorarium bagi pengelola pasar sehingga pengelolaan pasar rakyat dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

b. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat dalam rangka pengembangan dan perbaikan fasilitas bagi pedagang.

B. Hambatan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng dalam Melaksanakan Peran

Setiap Instansi pasti memiliki hambatan dalam melaksanakan perannya, dalam hal ini penulis mencoba mengurai melalui peraturan perundang-undangan dan implementasinya terhadap Dinas Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bantaeng.

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Maka dari itu yang menjadi rujukan dalam pengelolaan pasar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, adapun beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan pasar yaitu :²²

8. Pasal 18

Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.

9. Pasal 30

- c. Pengelolaan sarana Perdagangan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, atau badan usaha yang ditunjuk secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu.
- d. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Untuk prasarana fisik ada beberapa hal yang dilakukan yang pertama jika dianggap rusak berat dan tidak bisa di tangani maka Dinas Koperasi UKMK Dan Perdagangan meminta menteri perdagangan untuk revitalisasi

²² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Saran Perdagangan

atau pembangunan baru. Tetapi jika kerusakannya tak parah maka dilakukan revitalisasi atau perbaikan melalui APBD. Jadi, jumlah sebenarnya PAD dengan apa yang lakukan itu lebih besar. Tetapi itu bukan tujuan dari dinas koperasi umk dan perdagangan yang terpenting kesadaran untuk membayar dan bisa berusaha, sehingga kehidupan mereka lebih layak sebagai warga Negara dan pedagang pasar sentral Bantaeng, dan itu yang menjadi tujuan utama Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan bukan PADnya.²³

10. Pasal 31

Dalam pengelolaan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko, kios, los, dan/atau tenda dengan mempertimbangkan:

- d. Sosial ekonomi daerah;
- e. Jumlah pedagang yang akan menempati Pasar Rakyat; dan
- f. lokasi pasar.

Terkait retribusi itu berdasarkan dengan keputusan mereka dan pedagang itu sendiri. Jadi kami mengadakan Dinas BPKAD dalam hal ini bidang pendapatan akan mengundang sekitar 50 orang pedagang untuk mewakili pedagang pasar sentral bantaeng untuk penentuan tarif retribusi. Jadi, bukan penentuan dari Dinas koperasi Ukm dan perdagangan, tetapi dari mereka sendiri/pedagang sendiri.²⁴

Retribusi yang dibebankan kepada pedagang Pasar Sentral Bantaeng sebesar Rp. 1000,-/Hari dengan cara kerja oleh Kepala Pasar dan beberapa stafnya

²³ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

²⁴ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

yang berkeliling untuk meminta retribusi perharinya, kebijakan ini berdasarkan atas diskusi dari beberapa perwakilan pedagang yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan dan ditaati oleh semua pedagang.²⁵

11. Pasal 32

- d. Pembinaan terhadap pengelola Sarana Perdagangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 6) Peningkatan profesionalisme pengelola;
 - 7) peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - 8) pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - 9) pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - 10) penerapan perlindungan konsumen; dan
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan. Gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan secara langsung terhadap Sarana Perdagangan di daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan/atau daerah perbatasan, dalam bentuk pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan produk unggulan daerah.

Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan hanya melakukan sosialisasi langsung terkait cara pengelolaannya tetapi belum pernah melakukan pelatihan selama ini. Jadi, untuk peningkatan kapasitas pengelola pasar sentral

²⁵ Hasil Wawancara bersama Bapak Kamura Kepala Pasar Sentral Kabupaten Bantaeng

Bantaeng itu hanya membuatkan SOP. Kemudian di kementrian perdagangan itu diadakan training Kepala Pasar di Jakarta. Kemudian melakukan studi banding ke pasar-pasar yang dianggap terbaik di Indonesia. Jadi, sudah ada beberapa kepala pasar yang telah mengikuti pelatihan, termasuk kepala pasar sentral bantaeng, kepala pasar lambocca, dan kepala pasar banyorang. Ketiga kepala pasar itu telah mengikuti pelatihan dan sudah melakukan studi banding. Tetapi untuk pedagang, dinas koperasi Ukm dan Koperasi belum mengadakannya.²⁶

Peningkatan kompetensi pelaku usaha selama ini, Dinas koperasi Ukm Dan Perdagangan pernah bekerja sama dengan Dana Peduli, melakukan edukasi tetapi hanya di Pasar Lambocca, Pasar Sentral Bantaeng belum tersentuh karena kebetulan pada saat itu dinas koperasi Ukm dan Perdagangan bekerja sama dengan yayasan dana peduli. Mereka memberikan edukasi para pedagang maupun pada pengelolanya dan mereka memberikan bantuan sarana.²⁷

12. Pasl 34

- d. Gubernur atau bupati/wali kota dalam melakukan pemanfaatan Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Pusat Distribusi sesuai dengan peruntukannya dapat membentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.

²⁶ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

²⁷ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

e. Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/penjual dan pengelola sarana perdagangan.

f. Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, bupati/wali kota memberikan prioritas tempat usaha di dalam.

Persoalan Keamanan dilakukan secara khusus yang Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan adakan untuk bersama-sama kepada Kepala Pasar Sentral Bantaeng yang digaji khusus dari Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan kemudian bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan pengamanan. Jadi, secara internal ada dewan petugas khususnya sekitar 10 orang/pasar dan, Satpol PP yang berjaga di Pasar Sentral Bantaeng.

Persoalan kebersihan Pasar Sentral Bantaeng ditangani oleh Bepedalda dan ada pengelola yang di biyai oleh Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan, juga kepala pasar. Semua bersinergi dan tetap bekerja sama dari segi keamanan bekerja sama dengan Satpol PP, dari kebersihan Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan bekerja sama dengan Lingkungan hidup, dan dari segi lalu lintas Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub).²⁸

Perlindungan konsumen itu memang sudah ada, Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan memiliki tim dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, TNI, dan ketanganan pangan, untuk selalu melakukan pengawasan terhadap barang yang kadaluarsa, AMDK (Air Minum dalam Kemasan), semuanya dilakukan setiap tahunnya, apa lagi pada saat menjelang hari raya misalnya pada hari raya idul

²⁸ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

fitri, bulan puasa, tahun baru, dan hari Natal. Yang dilakukan rutin utamanya pada barang pokok, strategis, dan barang penting lainnya. Termasuk gas, semen dan lainnya. Kemudian, dari segi takarannya melakukan tera dan teraulang karena Dinas Koperasi, Ukm, dan Perdagangan belum mandiri dan bekerja sama dengan metrologi dan kementerian perdagangan.²⁹

Untuk menaikkan pendapatan pedagang dipasar Sentral Bantaeng, meskipun tidak secara langsung tetapi dari sarana dan prasarana dinas koperasi, ukm, dan perdagangan perbaiki kemudian penataannya juga telah dilakukan, melakukan edukasi bahwasanya bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana dia mengatur dagangannya, dan seterusnya, jadi itulah yang dinas kopersi, ukm, dan perdagangan lakukan saat ini. Masalah pendapatan, itu bersifat fleksibel ketika barang banyak, maka harga pun menurun. Tetapi jika barangnya sedikit, otomatis harga pun naik. Dan semua mengikuti hukum pasar. Pendapatan dari pedagang untuk 3 tahun terakhir ini sesuai dengan survei yang dilakukan. Peningkatan memang terus ada, setelah dinas koperasi, ukm, dan perdagangan mengadakan refitalisasi, dan hasilnya ada peningkatan walaupun sedikit.³⁰

Penanggulangangguan, terutama dilakukan dengan mengadakan operasi/penertiban terhadap jenis pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai dengan yang telah diatur dalam Perda dan Perbup. Dalam praktik penanggulangannya, Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja-sama dan atau didukung oleh aparat keamanan terkait.

²⁹ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

³⁰ Hasil Wawancara bersama Pak Samson KABAG Perdagangan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

Kendalayang dihadapi antara lain yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu atau belum mengerti tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur jenis pelanggaran tersebut di atas sehingga sering terjadi kesalahpahaman di lapangan pada saat Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan operasi/penertiban.

3. Hambatan Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan dalam melaksanakan Perannya

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Anggaran

Pada tahun anggaran 2018 serapan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan hanya mencapai 83% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.060.155.514,- ini disebabkan terjadinya devisa anggaran daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan bahkan ada beberapa kegiatan belanja modal yang telah selesai pelaksanaannya dibayarkan oleh pemerintah pada tahun anggaran 2018.

b. Permasalahan Teknis Bidang

- 1) Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas
- 2) Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok
- 3) Belum optimalnya Pengendalian dan pengawasan barang/jasa
- 4) Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen
- 5) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana perdagangan serta distribusi barang/jasa

- 6) Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat akan legalitas usaha
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi dan sistem resi gudang
- 8) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan potensi pasar ekspor
- c. Permasalahan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Permasalahan sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan yang dialami adalah terbatasnya Peralatan Kantor yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, disamping itu keterbatasan jumlah pegawai khususnya tenaga penera dalam rangka pelaksanaan tera/tera ulang.

C. Langkah Taktis yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Peran Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

1. Solusi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Peran Dinas Koperasi UKMK dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng

Dari permasalahan tersebut diatas maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng melakukan berbagai langkah – langkah strategis dalam pelaksanaan urusan Perdagangan sebagai berikut :

- a. Soslusi Permasalahan Anggaran

Diharapkan dalam penyusunan APBD agar memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah sehingga rencana kerja yang telah

disusun oleh OPD dapat dilaksanakan dengan baik serta utang kepada pihak ketiga agar

b. Soslusi Permasalahan Teknis

- 1) Melaksanakan Update data sektor perdagangan secara berkala
- 2) Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengendalian stok dan harga barang kebutuhan pokok serta melaksanakan pemantauan secara berkala.
- 3) Mengintensifkan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor perdagangan akan hak-hak masyarakat sebagai konsumen
- 4) Melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat yang terdapat di Kabupaten Bantaeng
- 5) Menyiapkan regulasi dalam pengelolaan pasar rakyat
- 6) Meningkatkan kualitas pengelola pasar rakyat melalui bimbingan teknis dan penerapan standar operasional pengelolaan pasar yang baik
- 7) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada pelaku usaha akan manfaat dan persyaratan legalitas usaha yang dijalankan
- 8) Melakukan koordinasi dengan dengan instansi teknis lainnya dalam rangka memudahkan dan mempercepat pengurusan legalitas usaha dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku

- 9) Optimalisasi pengelolaan system resi gudang sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga memasarkan komoditi yang dihasilkan
- 10) Melakukan pemetaan produk yang memiliki potensi untuk diekspor
- 11) Membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan eksportir sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan antara pedagang lokal dengan eksportir.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ;

- 9) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantaeng melakukan perannya dengan beberapa program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas ; Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemeterologian Daerah dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri atas Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. Sebagai rujukan dalam pengelolaan pasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, adapun beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan pasar yaitu Pasal 18, 30,31,32 dan 34 telah terimplementasi secara maksimal di Pasar Sentral Bantaeng dengan Peran Dinas Pengelola Pasar yaitu Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

- 10) Adapun Hambatan yang dialami adalah persoalan anggaran yang minim, Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas, Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, Belum optimalnya Pengendalian dan pengawasan barang/jasa, Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen, Masih rendahnya kualitas sarana prasarana perdagangan serta distribusi barang/jasa, Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat akan legalitas usaha, Belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi dan sistem resi gudang, Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan potensi pasar ekspor.

B. Saran

Bertolak dari temuan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Menaikkan Level Subtansi Hukum Tentang Pengelolaan Pasar menjadi Undang-undang bukan sekedar Peraturan Menteri sehingga sifat *Regelling* (mengatur) bisa terlaksana secara maksimal.
2. Kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban Pedagang Pasar pada umumnya serta penertiban pedagang liar sehingga nilai estetika pasar dapat dimunculkan.

3. Kepada Pedagang untuk bisa melakukan jenis usaha yang *fair* sesama pedagang dan tetap taat pada aturan dan kebijakan Pemerintah selama itu menjadi pijakan pembangunan Daerah dan pendapatan masyarakat.
4. Kepada Pembaca agar skripsi ini bisa menjadi bahan referensi yang edukatif sebagai penunjang ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang .Bayu Media.2003)
- Dirjosisworo Soedjono, *Kriminologi (pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*, (1985)
- Farid, Abidin Zainal.*Hukum Pidana I*. (Jakarta. Sinar Grafika. 1995)
- Kamus besar Bahasa Indonesia
- Laily Lolita Sari, *Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis Pada narapidan. Jurnal*.2017
- Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,(Jakarta.Sinar Grafika,2009)
- Maxmen, Jerrold S.. *Essential Psychopathologi*. (New York: W. W. Norton & Company. 1986)
- Mulyana W.Kusuma, *Kriminologi dan masalah Kejahatan*. (Armico. Bandung 1984)
- R. Soesilo, KUHP dan Komentari-Komentarnya Lengkap, (Bogor . Politei.1996)
- Roni. *Hirabah (begal) dalam Perspektif islam,Jurnal*.2018
- S.R. Sianturi, , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Alumni Ahaem- Petehean, 1986)
- Santoso T dan Zulfa E.A. *Kriminologi*. (Jakarta .Grafindo Persada .2001.)
- Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta.Rajawali Pers. 2010)

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bu Meriyani Madjid Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng



Wawancara Bersama Pak Syamson Kepala Bagian Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng



Wawancara Bersama Pak Kamura Kepala Pasar

Sentral Bantaeng



Wawancara Bersama Pak Tari Pedagang Pasa



Wawancara Bersama Ibu Hj Enny Cahyani Pedagang Pasar

RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “PERAN DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IAH”.

Yang bernama MUAWWAMATUL KHAERIA AL-JAROS dilahirkan di Bantaeng Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1998 dari ayah yang bernama H.Ali Mahmudi dan ibu Hj. Enny Cahyani.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 20 Tala-Tala pada Tahun 2004-2010. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat SMP Negeri 3 Bissappu 2010-2013. Dengan Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di SMA 1 Bantaeng pada tahun 2013-2016. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di fakultas Syariah dan hukum, Jurusan Hukum Tata Negara hingga tahun 2020.